



Badung Krisis Tenaga

Pendidik dan Kesehatan

Mangupura (Bali Post) -

Kabupaten Badung kini mengalami krisis tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini lantaran sejak kasus CPNS tahun 2012, Pemkab Badung sampai sekarang belum melakukan penerimaan CPNS baru. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badung I Gede Wijaya mengatakan, formasi guru paling dibutuhkan saat ini, terutama guru Sekolah Dasar (SD).

"Guru saja sekitar 600-san kami kurang, terbanyak guru SD. Kemudian tenaga kesehatan sekitar 400-san. Data pastinya saya tidak hafal," ujar Wijaya, Senin (7/6) kemarin.

Menurutnya, selain guru dan

tenaga kesehatan, Badung juga masih membutuhkan tenaga teknis lain. Walaupun tahun ini tidak ada perekrutan, tahun depan pihaknya akan tetap melaporkan kondisi kekurangan PNS ini ke pusat. Sebab, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) mengeluarkan edaran, tahun ini tidak ada perekrutan CPNS.

Dijelaskannya, setiap tahun pihaknya secara rutin melaporkan kondisi kepegawain di Badung ke Men-PAN RB maupun Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tahun 2015 ini, BKD Badung melaporkan adanya kekurangan PNS seribu lebih. "Rutin kami laporkan kondisi kepegawaian ke Men-PAN dan BKN. Tetapi tahun ini, Menpan

melalui surat edaran menyampaikan tak ada perekrutan CPNS," ucapnya.

Sementara itu, kalangan DPRD Badung sangat mendukung langkah eksekutif mengusulkan tambahan PNS. Meski jumlah PNS di Badung sudah lebih dari sembilan ribu orang, akan tetapi masih belum mencukupi. "Memang kenyataannya kita di Badung masih kekurangan PNS, khususnya tenaga guru. Pemerintah pusat harusnya melakukan evaluasi kebawah agar mengetahui kondisi



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400301

sesungguhnya," tegas anggota Komisi I DPRD Badung I Made Duama.

Pihaknya berjanji akan ikut mengawal perjuangan eksekutif. "Kalau tahun ini tidak bisa, paling tidak tahun depan kita harus mendapatkan formasi dari pusat," ujarnya. (kmb27)

Edisi: Selary, 7 jon 2015
Hal:





Debit Air Berkurang

Dewan Minta Dana Pelestarian Hutan Diperbanyak

Negara (Bali Post) -

DPRD Jembrana mengharapkan dinas terkait aktif mengajukan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pelestarian hutan. Pasalnya, keberadaan hutan sangat penting sebagai penyangga dan sumber air yang bermanfaat bagi pertanian di Jembrana. Desakan itu diutarakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jembrana, I Putu Kamawijaya saat rapat kerja (raker) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas KUA/PPAS, Senin (6/7) kemarin.

Anggota Fraksi Demokrat ini mengatakan perlunya anggaran yang lebih dari DAK untuk menjaga kelestarian hutan di Jembrana dan Bali secara umum. Sebab, menurutnya dengan luas hutan yang ada di Bali, harapir 70 persen berada

di Jembrana dan merupakan paru-paru Pulau Bali. Karena itu menurutnya diperlukan anggaran untuk pemeliharaan hutan untuk menjaga fungsi hutan menjaga keseimbangan alam.

"Sekarang ini sirkulasi air sudah tidak seperti dulu

lagi, hutan tidak bisa menyerap air dan menjadikannya sebagai sumber air. Karena itu harus dijaga kelestariannya," tandas Kamawijaya. Kondisi saat ini tidak seperti dulu, dimana ada hujan terjadi banjir dan air langsung mengalir ke laut. Daerah

bisa mengajukan dan mengusulkan anggaran untuk itu ke pemerintah pusat dalam bentuk DAK.

Ia meminta kepada eksekutif untuk aktif dan berkonsentrasi pada pengajuan DAK itu. Sementara itu, rapat yang sedianya membahas KUA/PPAS akhirnya ditunda. Dewan meminta agar KUA/PPAS disesuaikan dengan regulasi yang sudah berlaku yakni Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2016.

TAPD yang dipimpin Sek-

da Jembrana I Gede Gunadnya itu akhirnya sepakat rapat ditunda untuk penyesuaian aturan. Menurutnya penyesuaian itu baru akan dilakukan sosialisasi dari provinsi dalam waktu dekat. Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, mengatakan rapat ditunda hingga ada sinkronisasi dengan aturan baru yakni Permendagri 52 tahun 2015. "Kita tunda, agar pembahasan tidak siasia. Sambil SKPD fokus untuk pengajuan usulan bantuan ke pusat," terangnya. (kmb26)

Edisi

: salasa, 7 Juli 2015

Hal

: 10





DPRD Soroti Toilet Pasar Galiran

Semarapura (Bali Post)

Rusaknya beberapa fasilitas seperti toilet di Pasar Galiran disoroti anggota DPRD Klungkung. DPRD Klungkung me-minta agar Kepala UPT Pasar tidak serta merta mengejar target retribusi semata untuk meningkatkan PAD. Pengelola diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik bagi pedagang maupun masyarakat yang berkunjung ke pasar Galiran. "Pasar Galiran kan sumber PAD, jadi kita harapkan keluhan dari pedagang ini benar-benar diperhatikan," ujar Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, Senin (6/7) kemarin.

Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru mengatakan perso-alan yang terjadi di pasar Galiran harus mendapat perhatian serius. Apalagi di pasar tidak hanya terdapat pedagang, kenyamanan pengunjung juga diperhatikan. Ia juga mengaku sering mendapat keluhan terkait pengelolaan pasar Galiran. "Jangan hanya memikirkan untuk menjadi calon sekda saja. Kepentingan masyarakat diutamakan. Apalagi pasar merupakan sumber PAD," kritiknya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi II DPRD Klungkung Wayan Buda Partawa. Politisi asal Desa Timuhun ini juga meminta agar Kepala UPT Pasar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang maupun pengunjung. Apalagi persoalan toilet yang rusak. Hal ini bisa diperbaiki tahun ini dalam anggaran perubahan. Namun demikian, Buda meminta agar persoalan yang terjadi di pasar juga segera dituntaskan. Karena dia mendapat informasi tidak hanya persoalan WC yang rusak yang terjadi di pasar, namun saluran air dan masalah jalan juga perlu mendapat penanganan. (kmb)

: Selary, 7 July 2017 Edisi

2 Hal





Dugaan Penyimpangan UP PBB

Jaksa Periksa Empat Pejabat dan Mantan Sekda

Bangli (Bali Post) -

Empat pejabat aktif serta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Bangli, Senin (6/7) kemarin. Pemeriksaan yang berlangsung selama beberapa jam itu terkait dengan dugaan kasus penyimpangan pengelolaan upah pungut (UP) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2006-2010.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangli Bagus Putra seizin Kajari Ida Ayu Retnasari mengatakan adapun pejabat aktif yang diperiksa pihaknya kemarin yakni mantan Kadispenda yang juga mantan Plt. Sekda Bangli Bagus Rai Darmayuda, mantan Kabag Keuangan yang juga mantan Kadispenda Ketut Riang, Kabid Penagihan Pajak Basuki, serta Kasubag Perundangundangan Nasrudin.

Sementara mantan Sekda Bangli yang juga ikut diperiksa kemarin yakni Wayan Suarka. Kelimanya yang masih berstatus saksi tersebut mulai diperiksa jaksa sejak pukul 10.30 wita. Mereka diperiksa di ruangan terpisah. Bagus menjelaskan, kelimanya dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan upah pungut PBB tahun 2006-2010. Dimana sesuai dengan penyidikan sementara, pihak Kejari menemukan adanya indikasi perbuatan yang merugikan daerah.

Dikatakan Bagus dalam kasus ini jaksa mensinyalir sejumlah pejabat yang tidak turut bekerja ikut menikmati upah pungut dengan prosentase tertentu. Menurut Bagus, seharusnya upah pungut hanya diberikan kepada mereka yang melakukan pungutan. "Tetapi ini ada yang tidak bekerja ikut menerima upah pungut. Ini yang sedang kami dalami," terangnya. Disinggung berapa kira-kira nilai kerugian yang diakibatkan dari dugaan penyimpangan tersebut, Bagus Putra belum mau mengungkapkan. Sebab pihaknya masih harus menunggu hasil audit dari BPKP. "Untuk hal itu kami harus koordinasi dengan BPKP," katanya.

Bagus menambahkan selain memeriksa empat orang pejabat aktif dan satu orang mantan Sekda kemarin, belum lama ini pihaknya

juga telah memeriksa lima orang lainnya yang diduga mengetahui pengelolaan upah pungut PBB ini. "Total sudah ada 10 orang yang kami periksa. Lebih banyak dari Dispenda, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan beberapa yang terkait lainnya," bebernya. Sesuai rencana pada Selasa hari ini, pihaknya juga akan memeriksa beberapa pejabat di Lingkungan Pemkab Bangli lainnya. (kmb40)

Edisi

: salasa, 7 Juli 2015

Hal

: 10





Pipa Tua Bocor Air PDAM Kecrat-kecrit

Amlapura (Bali Post)

Jaringan pipa PDAM yang sudah tua di Kota Amlapura kerap rusak dan bocor. Saat perbaikan pipa tersebut, pasokan air terhambat atau kecrat-kecrit. Karena itu, pasokan air ke gedung

DPRD Karangasem juga kerap ngadat

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Karangasem, Nengah Sumardi, Senin (6/7) kemarin di Karangasem, menanggapi pasokan air ke gedung megah itu ngadat. Pasokan air Kamis-Jumat (2-3/7) dikeluhkan ngadat oleh anggota dewan dan karyawan setempat. Padahal, Jumat (3/7), ada rapat gabungan komisi dengan eksekutif dan banyak tamu yang datang. Sejumlah karyawan di sekretariat DPRD dan anggota DPRD di antaanya Gede Dauh Suprapta tampak kebingungan ke luar masuk toilet, tetapi tak ada air.

Sumardi mengaku terkadang air lancar, tetapi bisa juga seret air ke DPRD. Sementara itu, Sekwan Drs. Wayan Ardika kemarin, mengatakan, pihaknya sudah menanyakan masalah itu ke PDAM Karangasem. Diinformasikan, ada banyak perbaikan pipa jaringan PDAM di lingkungan Kota Amlapura. Banyaknya kerusakan atau kebocoran dan harus segera diperbaiki, agar air tak banyak yang terbuang percuma. Kebocoran pipa karena pipa sudah tua. Soalnya, jaringan pipanisasi air dari mata air Tauka, Desa Tiyingtali sekitar 3 km utara Kota Amlapura, sudah dibangun pada masa penjajahan Belanda tahun 1928.

Di lain pihak, Direktur PDAM Gede T. Baktiyasa, kemarin,

menyampaikan, pihaknya baru masuk kerja setelah cuti karena upacara ngaben di kampungnya di Desa Datah, Karangasem. Kemarin, dia mengaku belum tahu kenapa pasokan air ke kamar mandi di Sekretariat DPRD Karangasem kerap ngadat

Dia mengatakan, jaringan air bersih PDAM di Kota Amlapura memang sudah tua, diduga sudah banyak karatan. Karena itulah, kerap pipa bocor di dalam kota. Perbaikannya juga sulit, karena kebanyakan pipa PDAM jaringan tua di Kota Amlapura kini sudah berada di tengah jalan aspal. Saat ada pipa bocor, dilakukan penggalian aspal keras di tengah lalu lintas dan di bawah terik matahari.

Pasokan air PDAM ngadat, juga bisa disebabkan saat ada pengurasan air di reservoar atau bak penampungan seperti di reservoar Temega. Baknya tak terlalu besar dibandingkan banyaknya pasokan ke rumah penduduk serta mengisi pipa di perjalanan, sehingga usai pengurasan perlu waktu lama untuk mengisi bak reservoar dan perjalanan air dari reservoar ke pelanggan, sehingga perlu waktu menunggu air. "Namun, dalam satu atau dua hari, pasokan air kembali lancar," katanya. (013)

: Selasa, 7 Juli Edisi

Hal





Klinik Pendidikan

Ajukan Anggaran Rehab dan Operasional

Tabanan (Bali Post) -

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya, khususnya dalam mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Tabanan, pengelola Klinik Pendidikan mengajukan anggaran Rp 600 juta kepada Komisi IV DPRD Tabanan yang membidangi masalah pendidikan di anggaran perubahan APBD Tabanan. Jika disetujui, anggaran tersebut nantinya sebagian akan digunakan untuk kegiatan operasional dan sebagian lagi untuk rehabilitasi gedung yang kondisinya sangat tidak layak.

"Kami harapkan usulan ini disetujui," ujar Madra Suartana, Ketua Dewan Pendidikan Tabanan, Senin (6/7) kemarin. Dikatakannya dengan kondisi gedung yang tidak layak pakai tersebut, aktivitas atau program yang dikemas oleh klinik pendidikan selama ini selalu meminjam tempat lain. "Jika sudah ada bangunan layak, tentu saja permasalahan pendidikan tidak lagi pinjam tempat ke sana kemari," ujarnya.

Awalnya, kata Madra tahun anggaran induk 2015 memang ada anggaran untuk Klinik Pendidikan Rp 100 juta yang nempel di pagu anggaran Dinas pendidikan. Hanya saja, karena melihat peruntukan waktu itu dianggap tidak searah dengan program Klinik Pendidikan, dana itu dikembalikan.

"Pada anggaran perubahan kembali diajukan Rp 200 juta, tapi kami meminta ada penambahan anggaran karena perbaikan bangunan dan operasional. Ini juga melihat respons positif dari wabup dan kalangan dewan khususnya yang membidangi pendidikan," ucapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana menyambut baik kegiatan-kegiatan yang digelar oleh Dewan Pendidikan dan Klinik Pendidikan di Tabanan. "Awalnya kami ragu dengan keberadaan Klinik Pendidikan. Setelah beberapa kali menggelar sebuah workshop dan kegiatan pendidikan lainnya, kami meyakini kinerja lembaga ini," ujarnya.

Sebagai komisi yang membidangi pendidikan, pihaknya telah menganggarkan dana untuk Klinik Pendidikan sebesar Rp 200 juta dan untuk anggaran perubahan recananya menjadi skala prioritas diposkan anggaran untuk Klinik dan Dewan Pendidikan di Tabanan. (kmb28)

Edisi : Selasz, 7 Duliasoff
Hal : 16





Korupsi Pengadaan Lahan Dermaga Gunaksa

Hakim Sebut Terdakwa "Jeruk Makan Jeruk"

KASUS dugan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa di Klungkung, untuk terdakwa tim sembilan, Senin (6/7) kemarin sudah mulai masuk agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang terpisah, lima terdakwa yang menjalani pemeriksaan adalah I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja dengan ketua majelis hakim Cening Budiana. Sedangkan tim kedua adalah terdakwa Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung), Ir. I Made Ngurah (pensiu-nan PNS) dan A.A. Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung) dengan ketua majelis hakim Beslin Sihombing dibantu hakim anggota Sumali dan Hartono.

Kelima terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, mengaku menyesali perbuatannya karena bersalah dalam menjalankan SK yang dibuat oleh bupati. Pertama yang diperiksa sebagai terdak-wa adalah I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja. Jaksa penuntut umum (JPU) A.A. Gede Putra yang diberi kesempatan untuk bertanya lebih dahulu, awalnya mempertanyakan soal pertemuan. Dikatakannya, tim sembilan ini pernah rapat. Rapat pertama tentang pembentukan tim penilai di ruangan Plt. Sekda Klungkung (Janapria-red) dan kedua juga di sana. Sedangkan sosialisasinya, dilakukan di Gunaksa. "Sosialisasi mendatangkan bupati," sebut saksi.

"Mengapa mendatangkan bupati?," sambung hakim. "Karena kami di tim sembilan belum mendapatkan kesepakatan harga," sebutnya. Kedatangan bupati (Wayan Candra-red), untuk memediasi antara masyarakat pemilik tanah supaya terdapat kesepatan tentang ganti rugi. Awalnya tim penilai menemukan harga Rp 13.140.000 untuk satu arenya. Namun harga tersebut tidak disetujui hingga terjadi deadlock. Datanglah bupati dan akhirnya disepakati harga Rp 14 juta.

Dalam persidangan, terkuak bahwa itu adalah rekayasa karena pemilik tanah itu sang bupati (Candra-red) dengan menggunakan nama lain seperti Ni Made Anggara Juni Sari. Selain soal ganti rugi, yang membuat hakim dan jaksa cukup jengkel adalah peranan satgas yang dibentuk panitia pengadaan. "Tim penilai dibentuk Bapak Bupati," sebut terdakwa.

Terkuak pula, walau menjadi tim dan satgas, Gusti Ngurah Gede tidak pernah ke lapangan. Namun diakui, pernah menerima honor. Kendati demikian, terdakwa mengaku bahwa satgas sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Yang jelas, kata terdakwa, soal harga Rp 14 juta itu sudah ditentukan tim nilai yang ditunjuk bupati.

Majelis hakim mencoba mengorek, kenapa mesti Gunaksa ditetapkan sebagai lokasi dermaga. Saksi mengaku lupa alasannya. "Lupa yang mulia," kata terdakwa.

Hakim kembali mempertanyakan, mengapa bupati campur tangan, yang mestinya bupati hanya menerima laporan. Terdakwa bersikukuh dan berlasan, bupati diperlukan untuk negosiasi dengan pemilik lahan. "Karena tim sembilan merasa tidak mampu melakukan negosiasi," sebut terdakwa.

Lantas, bagaimana sampai pada kesimpulan? "Bapak bupati akhirnya menggunakan penilaian tim penilai," katanya. Dari harga semula yang ditawarkan Rp 13.140.000, dinaikkan oleh bupati hingga Rp 13,5 juta. Terakhir, disepakati Rp 14 juta. "Karena masyarakat tidak setuju jika harga Rp 13.140.000, sehingga pak bupati turun. Akhirnya deaclock," sebut saksi.

Hakim anggota kemudian mengejar kembali sebagaimana keterangan saksi, yakni harga tanah di sana Rp 8 juta. "Selaku satgas, mengapa harga tanah di sana semestinya yang Rp 8 juta disepakati Rp 14 juta, saudara tidak mengetahui itu?" Tanya hakim. Terdakwa mengatakan tidak tahu. "Lantas, tanggung jawab satgas pada siapa?," tanya hakim. Terdakwa mengatakan satgas bertanggung jawab pada panitia. "Lah, satgas saudara (terdakwa-red), panitia saudara (terdakwa-red), ini kan jeruk makan jeruk namanya, kata hakim jengkel. (asa)



TERDAKWA – Janapria dkk. saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Edisi : Idara, 7 Juli 2018

Hal $:\frac{3}{}$





Maksimalkan PAD



Bali Post/ded

PERTUMBU-HAN PAD di Kabupaten Gianyar secara nyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemkab Gianyar pun berkomitmen memaksimalkan capaian PAD melalui sejumlah program dan terobosan.

Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata belum lama ini mengungkapkan, upaya memaksimalkan PAD berupa tindak lanjut baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Teknis pelaksanaannya berupa rekonsiliasi harian dan bulanan, mengadakan sistem tunggu, audit terhadap wajib pajak (WP) dengan pendampingan dari Universitas Udayana dan saat ini sedang dilaksanakan uji coba sistem pajak online bekerja sama dengan BPD Bali.

"Serta terus berupaya menggali potensi WP baru. Untuk upaya ekstensifikasi ini, kami rutin melakukan pendataan dan mencari potensi-potensi baru baik potensi hotel, restoran, hiburan, dan air tanah. Seiring dengan hal tersebut, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan telah pula dilakukan," tambahnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan PAD, pemerintah akan segera memperbaiki sistem aplikasi yang berbasis IT, membuat regulasi serta menegakkan aturan yang ada. Di sisi lain, melakukan program intensifikasi terhadap objek pajak dan objek retribusi, juga berfokus pada proses penagihannya dengan melibatkan semua unsur SKPD terkait.

Terkait pajak air tanah yang hingga saat ini masih terdapat pemungutan dengan sistem komulatif meskipun WP telah memasang water meter, Agung Bharata menyatakan, pemerintah sudah mengimbau WP untuk mengganti water meter yang rusak atau mati. Menurutnya, sesuai ketentuan dan saran BPK, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Gianyar tidak memiliki kewenangan dalam hal pengadaan water meter. "Untuk itu ke depannya, Dispenda akan menetapkan volume pemakaian air berdasarkan kapas tas pompa yang dimiliki oleh WP," tegasnya. (ded)







Gusti Ngurah Supanji

Pendamping PNPM

APARATUR desa diharapkan tidak takut dalam mengelola dana desa. Sepanjang memenuhi aturan dan sesuai juklak, pengelolaan dana desa akan terhindar dari praktik penyimpangan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Gusti Ngurah Supanji merespons kekhawatiran banyak kalangan terhadap kinerja aparatur desa dalam mengelola dana desa. "Kami telah berkali-kali mengadakan bimtek. Saya yakin mereka bisa mengelola dana tersebut dengan baik," ujarnya, belum lama ini. Bahkan terkait tenaga pendamping yang diharapkan bisa meminimalisir kesalahan administrasi yang berujung pada kasus hukum, Supanji menekankan jika Kementrian Desa sudah meluncurkan dana pendampingan, khususnya terhadap pelaksanaan dana desa. Mantan Kadis DKP Tabanan ini manambahkan sebelum pemerintah pusat mencanangkan program pendampingan, pihaknya bahkan selama tiga bulan telah melakukan program tersebut yang didanai APBD. "Pendamping PNPM yang berakhir Desember 2014 kita rekrut kembali dan diarahkan ke pendampingan selama tiga bulan, dimana per kecamatan dua tenaga pendamping yakni fasilitator kecamatan dan fasilitator teknis," jelasnya. Ditambahkannya alokasi dana desa sudah ditransfer ke rekening desa, sedangkan Dana Alokasi Daerah (DAD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) belum sepenuhnya diterima oleh desa (kmb28)

Edisi : Felaty, 7 July 2017

Hal : LC





Sidang Dugaan Korupsi Adhi Karya

Pengacara Bongkar Bagi-bagi THR Tambahan

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Kepala Divisi PT Adhi Karya Wilayah VII, Imam Wijaya Santosa, Senin (6/7) kemarin kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Wayan Sutarjana, Martinus Tonduh Suluh, dkk., menghadirkan sejumlah saksi, yakni Jaspiran Bin Jayadi, Ni Made Mulyati dan Fitri Arnitha Dewi. Yang menarik, dalam sidang yang dipimpin hakim Cening Budiana dengan hakim anggota Gede Hariadi dan Sumali, justru terungkap bahwa PT adhi Karya mengeluarkan atau bagi-bagi Tunjangan Hari Raya (THR) tambahan.

Awalnya, saksi berusaha berbohong dan mengaku tidak menerima. Namun berkat kegesitan pengacara terdakwa, yakni Agus Sujoko dan Edy Hartaka, saksi akhirnya men-

gakui sudah menerima, bahkan sejak kepemimpinan PT Adhi Karya sebelum terdakwa Iman Wijaya Sentoso. Tiga orang saksi ini dikejar terkait pola bagi-bagi THR tambahan, selain THR resmi. Mulyati mengatakan, memang dirinya mendapatkan THR resmi Rp 3,5 juta. THR resmi ini langsung masuk ke rekening masing-masing. Kemudian, dia dipanggil lagi oleh terdakwa Imam Wijaya, diberikan lagi tambahan secara pribadi Rp 3,3 juta. Untuk tahun 2009, kembali diberikan dengan pola sama, tambahan Rp 3,5 juta selain THR resmi.

Pengakuan yang sama juga disebutkan Fitri. Dia mengatakan mendapatkan THR. Dia mendapatkan Rp 2,3 juta tambahan, sedangkan yang resmi adalah Rp 2,6 juta. Sedangkan, Jaspiran mengakui dapat tambahan, tetapi nilainya lupa. "Saya dikasi, saya bilang terima kasih," ungkapnya.

Ada sekitar 50 karyawan yang dapat uang tambahan dari Wijaya dan diserahkan langsung oleh terdakwa. Setelah terjadi kasus, akhirnya semua THR tambahan ini dikumpulkan kembali oleh bagian keuangan dan diserahkan ke jaksa.

Imam Wijaya diberikan kesempatan untuk menanggapi dan bertanya. Terdakwa memilih bertanya, yakni mengapa THR tambahan dari Kepala Divisi sebelumnya tidak diakui. "Pola itu saya lakukan karena meniru yang sebelum—sebelumnya. Kenapa tidak diakui?," tanya Imam Wijaya. Semua saksi awalnya terdiam, sebelum akhirnya mengaku tidak ada. Majelis hakim juga berusaha mengorek, namun saksi tetap mengatakan tidak ada.

Pengacara terdakwa, Agus

Sujoko, giliran bertanya. "Kalian sudah disumpah. Saksi disumpah. Ini tanggung jawab ke Tuhan. Ini bulan puasa, jangan bohong," ungkap Agus Sujoko, kembali mempertanyakan soal THR tambahan itu.

Saksi pun keder dan kebohongan saksi terkuak. Mulyati akhirnya buka suara dan mengatakan pola tambahan THR memang sudah ada sejak (pimpinan divisi) sebelumnya. Dia mengatakan, era kepala Divisi Imam Baikhaki juga sama. "Ya saya mengakui, zaman Pak Imam juga sama ada tambahan," ungkapnya.

Sedangkan dua saksi lainnya, dari jawaban tidak ada malah mengaku lupa. Atas kondisi ini, kembali dikejar. "Apakah uang yang didapat sebelum-sebelumnya dikembalikan ke jaksa," tanya Agus Sujoko. "Tidak," jawab Mulyati. (kmb37)

Edisi : felara, 7 juli 2015

Hal : $\frac{3}{2}$





Suwirta Harapkan Petugas Damkar Sigap

Semarapura (Bali Post) -

Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di Pemkab Klungkung semakin meningkat. Setelah pembangunan Puskesmas Banjarangkan I, kini giliran bangunan Pemadam Kebakaran (Damkar) Klungkung mulai dikebut pengerjaannya. Pengerjaan bangunan Damkar yang berada satu lingkungan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Klungkung ini ditandai peletakan batu pertama oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Senin (6/7) kemarin.

Kadis PU Klungkung, Ketut Suayadnya di sela-sela peletakan batu pertama mengatakan pembangunan bangunan gedung Damkar dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 2,2 miliar lebih. "Selain menjadi garase kendaraan Damkar, nantinya juga diperuntukkan ruang administrasi petugas," ujar Suayadnya didampingi Kasi Damkar Wayan Toya.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta berharap dengan dibangunnya bangunan Damkar berlantai dua ini ke depannya bisa mencukupi untuk menyimpan sarana pemadam serta meningkatkan kesigapan petugas dalam menyiapkan peralatan apabila terjadi suatu musibah. "Jika terjadi suatu musibah alat-alat bisa cepat keluar," ujar Bupati Suwirta. Selain itu, dengan meningkatnya tempat dan fasilitas yang mencukupi, bupati asal Nusa Penida ini berharap kinerja petugas Damkar semakin meningkat.



BATU - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Damkar, Senin (6/7) kemarin.

Edisi : fclasa, 7 July 2015

Hal : _________